

## TATA RUANG WILAYAH - RENCANA

2024

PERDAPROV NTT NO. 4, LD 2024/NO.004 TLD NO.0132

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2043

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 26 Tahun 2008, PP No. 21 Tahun 2021, PERMEN ATR/BPN No. 15 Tahun 2021, PERMEN ATR/BPN No. 21 Tahun 2021, PERMEN KKP No. 28 Tahun 2021 dan PERMENDAGRI No. 58 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 dengan menetapkan batasan pengertian dan definisi yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan penataan ruang wilayah darat dan laut Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana guna mendukung pengembangan kawasan pariwisata dan perekonomian yang berdaya saing nasional. Diatur tentang Wilayah perencanaan, Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi : Sistem permukiman, Sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Diatur juga tentang Kawasan strategis provinsi, Arahana pemanfaatan ruang wilayah provinsi, Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, Peran masyarakat dan kelembagaan, Penyidikan dan Ketentuan peralihan.

- Catatan
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2024
  - Seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
  - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037, tidak berlaku.
  - Penjelasan : 11 hlm